



Penguatan Tata Kelola Perencanaan Penyelenggaraan Statistik Nasional Berbasis Kebutuhan dan Pemanfaatan Data

Vony Wahyunurani
Badan Pusat Statistik, Indonesia
Email: vony@bps.go.id

Keywords:

National Statistics; Statistical Planning; Data Needs; Statistical Utilization; Evidence-Based Policymaking

Kata Kunci:

Statistik Nasional; Perencanaan Statistik; Kebutuhan Data; Pemanfaatan Data; Tata Kelola Statistik

Abstract

National statistical systems play a strategic role in supporting data-based planning, implementation, monitoring, and evaluation of development programs. However, national statistical planning still faces major limitations because information on user needs and statistical data utilization has not been adequately integrated into the planning process. This study aims to analyze governance problems in national statistical planning and formulate appropriate policy alternatives to strengthen the relevance and usefulness of statistics for development. The study employed a policy analysis approach using secondary data obtained from regulations, scientific literature, the Data Needs Survey, and the Evaluation of Sectoral Statistical Implementation. Problem prioritization was conducted using the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method, while policy alternatives were assessed using Dunn's evaluation criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that the most strategic problem is the lack of integration between information on user needs and statistical data utilization in the planning process. Among the three policy alternatives evaluated, strengthening statistical planning governance through the integration of user needs and data utilization information received the highest score. In conclusion, a standardized and sustainable national guideline is needed to support more responsive statistical planning and to ensure that the statistics produced are relevant, useful, and aligned with development priorities.

Abstrak

Penyelenggaraan statistik nasional memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berbasis data. Namun, proses perencanaan statistik nasional masih menghadapi keterbatasan karena belum sepenuhnya didukung oleh informasi yang memadai mengenai kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tata kelola perencanaan penyelenggaraan statistik nasional serta merumuskan alternatif kebijakan yang tepat untuk memperkuat relevansi dan nilai guna statistik dalam pembangunan. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari regulasi, literatur ilmiah, Survei Kebutuhan Data, serta Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Prioritas masalah dianalisis menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG), sedangkan alternatif kebijakan dievaluasi menggunakan kriteria Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan paling strategis adalah belum terintegrasinya informasi kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik dalam proses perencanaan. Dari tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, penguatan tata kelola perencanaan penyelenggaraan statistik melalui integrasi

informasi kebutuhan dan pemanfaatan data memperoleh skor tertinggi. Kesimpulannya, diperlukan pedoman nasional yang terstandar dan berkelanjutan agar statistik yang dihasilkan lebih relevan, bernilai guna, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

PENDAHULUAN

Statistik resmi (*official statistics*) merupakan infrastruktur informasi publik yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Statistik menyediakan gambaran objektif mengenai kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan lingkungan yang diperlukan untuk memahami permasalahan pembangunan, menetapkan prioritas, serta mengukur capaian pembangunan secara terukur. Pentingnya statistik dalam pembangunan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa statistik diperlukan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, Tajulfitri (2019) menjelaskan bahwa statistik merupakan kebutuhan mendasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Peran statistik semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas pembangunan dan kebutuhan pengambilan keputusan berbasis data (Salsabila *et al.* 2024; Dotulong *et al.* 2026). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menempatkan data dan informasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program Pembangunan (Sudianing dan Seputra 2019; Far 2022). Dalam konteks tersebut, statistik tidak hanya berfungsi menggambarkan kondisi yang terjadi, tetapi juga menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, dan pengukuran capaian pembangunan. Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2009) menegaskan bahwa apa yang diukur akan memengaruhi tindakan yang diambil oleh pembuat kebijakan sehingga kualitas informasi statistik berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan.

Agar dapat dipercaya dan digunakan secara luas, statistik harus memenuhi standar kualitas yang mencakup aspek akurasi, relevansi, konsistensi, ketepatan waktu, keterbandingan, serta transparansi metodologi. MacFeely (2019) menjelaskan bahwa tantangan utama lembaga statistik modern tidak hanya menghasilkan data dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan bahwa data tersebut memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pengambilan keputusan.

Namun demikian, kualitas statistik saja tidak selalu menjamin bahwa data yang dihasilkan memberikan manfaat yang optimal. Perkembangan statistik resmi menunjukkan adanya pergeseran perhatian dari *data production* menuju *data use*, yaitu penekanan pada sejauh mana statistik dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nutley, Walter, dan Davies (2007) menjelaskan bahwa nilai suatu informasi tidak hanya ditentukan oleh kualitasnya, tetapi juga oleh tingkat pemanfaatannya dalam proses kebijakan dan perbaikan layanan publik. Sejalan dengan itu, Head (2016) menegaskan bahwa penggunaan bukti yang kredibel merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik, sedangkan Kusek dan Rist (2004) menekankan pentingnya dukungan data yang konsisten dan berkelanjutan dalam sistem monitoring dan evaluasi pembangunan.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *Data Revolution for Sustainable Development* menegaskan bahwa data merupakan fondasi bagi pengukuran kemajuan pembangunan, akuntabilitas kebijakan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kontribusi statistik resmi terhadap pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan data yang berkualitas, tetapi juga oleh kemampuan memastikan bahwa statistik yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan pengguna dan memberikan manfaat nyata dalam proses pembangunan (Herwanti *et al.* 2024; Mozin *et al.* 2025). Dengan demikian, penguatan penyelenggaraan statistik nasional perlu memperhatikan tidak hanya aspek produksi data, tetapi juga identifikasi kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Meningkatnya kebutuhan data untuk mendukung pembangunan dan pengambilan keputusan menuntut penyelenggaraan statistik nasional yang mampu menyediakan data yang relevan, berkualitas, dan mudah dimanfaatkan oleh pengguna. Perkembangan teknologi informasi, transformasi digital pemerintahan, serta meningkatnya jumlah produsen data telah menciptakan lingkungan penyelenggaraan statistik yang semakin kompleks. Dalam kerangka Sistem Statistik Nasional, penyelenggaraan statistik tidak hanya dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi juga oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara statistik lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kondisi tersebut menuntut tata kelola statistik yang mampu memastikan keterpaduan penyelenggaraan statistik nasional dalam mendukung kebutuhan pembangunan. United Nations (2014) menjelaskan bahwa perkembangan *data revolution* telah meningkatkan tuntutan terhadap sistem statistik yang lebih responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Berdasarkan identifikasi terhadap kondisi penyelenggaraan statistik nasional, terdapat tiga permasalahan utama yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan statistik nasional.

Dalam penyelenggaraan statistik modern, relevansi statistik tidak hanya ditentukan oleh kualitas data yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan manfaat dalam proses pengambilan keputusan. Nutley, Walter, dan Davies (2007) menjelaskan bahwa nilai suatu informasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas informasi tersebut, tetapi juga oleh tingkat pemanfaatannya dalam proses kebijakan dan pelayanan publik. Sementara itu, Head (2016) menegaskan bahwa penggunaan bukti dalam pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh relevansi informasi terhadap kebutuhan pengguna dan pembuat kebijakan.

Di lingkungan BPS, kebutuhan pengguna data secara berkala diukur melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). Hasil SKD menunjukkan bahwa kualitas data BPS memperoleh penilaian yang baik dari pengguna. Selama periode 2016–2025, nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) kualitas data berada pada kategori baik dan cenderung meningkat hingga mencapai 94,69 pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data yang dihasilkan BPS secara umum telah memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi dari pengguna.

SKD juga menghasilkan informasi mengenai perolehan data yang dibutuhkan pengguna. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa masih terdapat pengguna yang belum memperoleh data sesuai kebutuhannya. Namun, persentase perolehan data menunjukkan fluktuasi yang cukup besar antar tahun sehingga sulit digunakan untuk menggambarkan perkembangan kebutuhan data secara konsisten. Informasi yang dihasilkan lebih mencerminkan pengalaman pengguna dalam memperoleh data dibandingkan kebutuhan data statistik yang diperlukan untuk mendukung perencanaan penyelenggaraan statistik nasional.

Karakteristik SKD yang berfokus pada pengguna layanan statistik menyebabkan informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan data seluruh

pemangku kepentingan pembangunan. Cakupan informasi yang tersedia juga belum dirancang untuk memetakan kebutuhan data strategis lintas sektor, kebutuhan data yang berkembang seiring perubahan lingkungan pembangunan, maupun prioritas statistik yang diperlukan dalam jangka menengah dan panjang. Akibatnya, informasi yang tersedia belum memadai untuk digunakan sebagai dasar penentuan prioritas statistik nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme identifikasi kebutuhan data statistik yang tersedia saat ini masih memiliki keterbatasan dalam menghasilkan informasi yang komprehensif bagi proses perencanaan penyelenggaraan statistik nasional. Situasi ini tidak hanya menjadi tantangan bagi BPS sebagai pembina statistik nasional, tetapi juga bagi penyelenggara statistik lainnya dalam menentukan prioritas statistik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Identifikasi kebutuhan data masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing penyelenggara statistik sehingga belum tersedia mekanisme yang terstandar dan terintegrasi untuk menghasilkan informasi kebutuhan data sebagai dasar penentuan prioritas statistik nasional.

Peningkatan kebutuhan data untuk mendukung pembangunan menuntut tersedianya statistik yang tidak hanya relevan, tetapi juga berkualitas dan dapat dipercaya oleh pengguna. Dalam penyelenggaraan statistik modern, kualitas statistik menjadi salah satu faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan pengguna terhadap data yang dihasilkan. Kualitas statistik tidak hanya mencakup akurasi, tetapi juga konsistensi, keterbandingan, ketepatan waktu, transparansi metodologi, serta kesesuaian dengan standar statistik yang berlaku. MacFeely (2019) menjelaskan bahwa tantangan utama lembaga statistik modern tidak hanya menghasilkan data dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan bahwa data yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan secara tepat.

Sebagai pembina data statistik, BPS telah melaksanakan berbagai upaya penguatan tata kelola statistik melalui penyusunan standar statistik, metadata statistik, rekomendasi kegiatan statistik, serta Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Berbagai instrumen tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dan kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah. Salah satu gambaran perkembangan tersebut dapat dilihat dari hasil EPSS yang menunjukkan peningkatan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah selama periode 2023–2024.

Hasil EPSS menunjukkan adanya peningkatan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Jumlah instansi pada tingkat kematangan rendah mengalami penurunan, sementara jumlah instansi pada tingkat kematangan menengah meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan statistik yang dilakukan BPS telah mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaraan statistik di berbagai instansi pemerintah. Namun demikian, peningkatan kematangan penyelenggaraan statistik belum sepenuhnya menjamin kualitas statistik yang dihasilkan. Dalam praktik penyelenggaraan data pemerintah masih dijumpai kondisi di mana data yang menggambarkan fenomena yang sama dapat menghasilkan angka yang berbeda antarinstansi. Maulidya dan Rozikin (2022) menunjukkan bahwa konsistensi dan harmonisasi data masih menjadi salah satu tantangan dalam implementasi Satu Data Indonesia. Demikian pula Ardani dan Cahyani (2022) menunjukkan bahwa perbedaan pencatatan dan pengelolaan data antarinstansi dapat menyebabkan perbedaan informasi yang dihasilkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa instrumen yang tersedia saat ini lebih berfokus pada evaluasi tata kelola dan proses penyelenggaraan statistik, sementara mekanisme yang secara khusus menjamin kualitas output statistik sebelum diseminasi masih belum tersedia secara memadai. Akibatnya, belum terdapat jaminan yang sistematis bahwa statistik yang dihasilkan oleh berbagai penyelenggara statistik telah memenuhi standar kualitas yang konsisten dan dapat digunakan sebagai rujukan bersama dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penjaminan kualitas statistik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap statistik resmi dan memperkuat tata kelola penyelenggaraan statistik nasional.

Perkembangan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks dan lintas sektor menuntut tersedianya data yang terintegrasi serta dapat digunakan secara bersama oleh berbagai penyelenggara statistik. Dalam Sistem Statistik Nasional, statistik tidak hanya dihasilkan oleh BPS, tetapi juga oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta penyelenggara statistik lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap integrasi dan berbagi pakai data statistik menjadi semakin penting untuk memastikan tersedianya informasi yang konsisten, efisien, dan dapat digunakan sebagai rujukan bersama dalam pembangunan nasional.

Untuk mendukung Satu Data Indonesia, pemerintah telah menetapkan regulasi Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Kebijakan tersebut memberikan landasan bagi penerapan standar interoperabilitas data dan informasi dalam pelaksanaan berbagi pakai data dan informasi antar layanan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ardani dan Cahyani (2022) menunjukkan bahwa perbedaan definisi, mekanisme pencatatan, dan pengelolaan data antarinstansi dapat menghasilkan informasi yang berbeda untuk objek yang sama. Maulidya dan Rozikin (2022) juga menunjukkan bahwa interoperabilitas dan integrasi data antarinstansi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi Satu Data Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses pertukaran, integrasi, dan pemanfaatan data antarinstansi.

Sejalan dengan itu, Maratis, Wijaya, dan Wike (2025) menjelaskan bahwa transformasi statistik nasional memerlukan harmonisasi data, penguatan kolaborasi, serta koordinasi yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan agar data dapat dimanfaatkan secara terpadu. Azizah dan Permana (2024) juga menemukan bahwa koordinasi pengelolaan data antar organisasi pemerintah masih belum berjalan secara optimal sehingga integrasi data belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, tantangan integrasi dan berbagi pakai data statistik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi atau regulasi interoperabilitas, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, koordinasi, serta mekanisme kelembagaan yang mengatur harmonisasi dan penggunaan data statistik antar penyelenggara statistik. Akibatnya, proses penyediaan statistik masih berpotensi menghasilkan duplikasi pengumpulan data, perbedaan informasi statistik antarinstansi, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Untuk menentukan fokus analisis dalam kajian ini, dilakukan penentuan prioritas masalah menggunakan pendekatan USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Pendekatan ini digunakan untuk menilai tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan masing-masing

permasalahan apabila tidak segera ditangani. Identifikasi dilaksanakan berdasarkan analisis penulis dengan mempertimbangkan berbagai referensi dan data yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis USG, permasalahan mengenai perencanaan penyelenggaraan statistik nasional yang belum didukung informasi yang memadai mengenai kebutuhan dan pemanfaatan data statistik memperoleh skor tertinggi. Permasalahan ini dinilai paling strategis karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan penyelenggaraan statistik nasional dalam menghasilkan data yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung pembangunan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, permasalahan tersebut dipilih sebagai fokus utama dalam kajian ini.

Dalam kerangka Sistem Statistik Nasional, perencanaan penyelenggaraan statistik merupakan tahapan penting yang menentukan arah, prioritas, dan alokasi sumber daya dalam menghasilkan statistik yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan pengambilan keputusan. Perencanaan yang efektif memerlukan informasi yang memadai mengenai kebutuhan dan pemanfaatan data statistik agar penyelenggaraan statistik dapat menghasilkan data yang relevan, bernilai guna, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan. Namun demikian, mekanisme yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu menghasilkan dan mengintegrasikan informasi tersebut secara sistematis sebagai dasar penentuan prioritas statistik nasional.

Analisis terhadap kondisi penyelenggaraan statistik nasional menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan mekanisme identifikasi kebutuhan data statistik, pengukuran pemanfaatan data statistik, serta pengelolaan informasi yang dihasilkan dari kedua proses tersebut. Ketiga faktor tersebut tidak hanya memengaruhi kemampuan penyelenggara statistik dalam memahami kebutuhan pengguna, tetapi juga memengaruhi kemampuan Sistem Statistik Nasional dalam menentukan prioritas penyediaan data yang memberikan manfaat terbesar bagi pengguna dan pembangunan.

Penyebab pertama adalah mekanisme identifikasi kebutuhan data statistik belum dilaksanakan secara terstandar dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Statistik Nasional. Dalam praktik penyelenggaraan statistik nasional, kebutuhan data pengguna terus berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas pembangunan, transformasi digital, dan kebutuhan pengambilan keputusan berbasis data. Kondisi tersebut menuntut penyelenggara statistik untuk memiliki mekanisme yang mampu menangkap kebutuhan pengguna secara sistematis dan berkelanjutan. Bryson (2018) menjelaskan bahwa organisasi publik memerlukan pemahaman yang memadai mengenai kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan sebagai dasar dalam menentukan prioritas dan arah strategis organisasi. Perencanaan yang tidak didukung informasi kebutuhan pemangku kepentingan berisiko menghasilkan program dan layanan yang kurang relevan dengan kebutuhan pengguna.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat mekanisme nasional yang secara khusus mengatur proses identifikasi kebutuhan data statistik sebagai bagian dari perencanaan penyelenggaraan statistik nasional. Akibatnya, proses identifikasi kebutuhan data masih dilakukan secara beragam oleh masing-masing penyelenggara statistik sesuai kebutuhan dan kapasitas institusinya. BPS selaku badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik telah melaksanakan Survei Kebutuhan Data (SKD) secara rutin sejak tahun 2011. Akan

tetapi, SKD pada dasarnya dirancang sebagai instrumen evaluasi pelayanan statistik sehingga sebagian besar indikator yang diukur berorientasi pada kepuasan pengguna terhadap kualitas data dan layanan statistik. Konsekuensinya, informasi yang dihasilkan lebih banyak menggambarkan tingkat kepuasan pengguna dibandingkan kebutuhan data statistik yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan statistik nasional.

Selain itu, cakupan responden SKD masih terbatas pada pengguna layanan statistik yang mengakses data melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan data dari pengguna yang memperoleh data melalui kanal lain, memanfaatkan publikasi secara mandiri, menggunakan data melalui sistem elektronik, atau memanfaatkan data sekunder yang telah beredar, belum sepenuhnya teridentifikasi. Karakteristik responden SKD juga belum tentu merepresentasikan pihak yang menggunakan data dalam proses pengambilan keputusan karena responden dapat berasal dari petugas pengambil data, peneliti, mahasiswa, maupun perantara pengguna data lainnya. Dengan demikian, informasi mengenai kebutuhan data statistik yang dihasilkan belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan pengguna secara komprehensif sebagai dasar dalam perencanaan penyelenggaraan statistik nasional.

Penyebab kedua adalah pengukuran pemanfaatan data statistik belum dilakukan secara komprehensif untuk menggambarkan penggunaan data pada seluruh tahapan siklus pembangunan dan pengambilan keputusan. Informasi mengenai pemanfaatan data diperlukan untuk memahami sejauh mana statistik yang dihasilkan benar-benar digunakan dan memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan. Dalam perspektif manajemen kinerja publik, informasi mengenai penggunaan suatu produk atau layanan menjadi bagian penting dalam mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan organisasi. Kusek dan Rist (2004) menjelaskan bahwa informasi kinerja perlu tersedia pada seluruh tahapan siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, agar dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pengukuran kinerja internal, BPS telah mengembangkan indikator Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS). Pengukuran TPDS saat ini didominasi oleh komponen TPDS-DP yang memiliki bobot sebesar 80 persen dan diukur berdasarkan penggunaan data BPS dalam dokumen perencanaan pemerintah. Sementara itu, komponen TPDS-U yang memiliki bobot sebesar 20 persen diperoleh melalui Survei Kebutuhan Data. Pendekatan tersebut memberikan gambaran mengenai pemanfaatan data statistik dalam dokumen perencanaan, namun belum sepenuhnya mampu menggambarkan penggunaan data pada seluruh tahapan siklus pembangunan dan pengambilan keputusan. Pemanfaatan data statistik dalam pelaksanaan program, monitoring pembangunan, evaluasi kebijakan, penganggaran, pengelolaan risiko, maupun pengambilan keputusan operasional belum tercakup secara memadai dalam pengukuran yang ada.

Keterbatasan tersebut menyebabkan informasi mengenai manfaat statistik yang tersedia saat ini masih bersifat parsial dan belum memberikan gambaran yang utuh mengenai nilai guna statistik dalam mendukung pembangunan. Selain itu, pengukuran yang berfokus pada penggunaan data BPS juga belum memberikan gambaran mengenai pemanfaatan statistik dalam konteks penyelenggaraan Statistik Nasional secara keseluruhan. Akibatnya, informasi mengenai manfaat statistik yang tersedia saat ini masih belum cukup untuk mendukung proses perencanaan statistik yang berorientasi pada nilai guna dan dampak penggunaan data.

Penyebab ketiga adalah informasi kebutuhan dan pemanfaatan data statistik belum terintegrasi dalam proses perencanaan penyelenggaraan statistik nasional. Informasi mengenai kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data pada dasarnya merupakan dua sumber informasi yang saling melengkapi dalam menentukan prioritas penyelenggaraan statistik. Informasi kebutuhan data dapat memberikan gambaran mengenai data apa yang diperlukan pengguna, sedangkan informasi pemanfaatan data dapat menunjukkan data mana yang benar-benar digunakan dan memberikan manfaat dalam pembangunan. Oleh karena itu, kedua informasi tersebut perlu dikelola secara terpadu agar dapat menghasilkan dasar yang kuat dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan prioritas statistik. Mintzberg (1994) menjelaskan bahwa efektivitas perencanaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memanfaatkan informasi yang relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, laporan United Nations (2014) mengenai *Data Revolution for Sustainable Development* menekankan pentingnya integrasi berbagai sumber informasi untuk menghasilkan sistem data yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan pengguna data.

Namun demikian, informasi mengenai kebutuhan dan pemanfaatan data statistik saat ini masih dikelola secara terpisah dan belum terhubung secara sistematis dengan proses perencanaan penyelenggaraan statistik nasional. Kondisi tersebut juga terlihat dalam proses penentuan prioritas data yang masih dilakukan oleh masing-masing produsen data sesuai kebutuhan sektoral dan kewenangannya. Meskipun kebutuhan data dan pemanfaatan data terus berkembang, belum terdapat mekanisme yang secara sistematis mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam proses penentuan prioritas statistik maupun penyusunan program statistik nasional. Akibatnya, proses perencanaan penyelenggaraan statistik belum memiliki dasar informasi yang komprehensif untuk menentukan statistik mana yang perlu diprioritaskan, dikembangkan, dipertahankan, atau ditingkatkan kualitasnya. Kondisi ini menyebabkan penyelenggaraan statistik nasional menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa sumber daya statistik yang tersedia benar-benar diarahkan untuk menghasilkan data yang paling dibutuhkan dan paling memberikan manfaat bagi pengguna.

Ketiga penyebab tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan perencanaan penyelenggaraan statistik nasional tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi mengenai kebutuhan dan pemanfaatan data statistik, tetapi juga berkaitan dengan belum terbangunnya mekanisme yang mampu menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan informasi tersebut secara terpadu dalam proses perencanaan. Akibatnya, penyelenggaraan statistik nasional belum memiliki landasan informasi yang memadai untuk memastikan bahwa statistik yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung pembangunan serta pengambilan keputusan.

Rumusan Masalah

Pembahasan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan penyelenggaraan statistik nasional masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi yang memadai mengenai kebutuhan dan pemanfaatan data statistik. Mekanisme identifikasi kebutuhan data statistik belum dilaksanakan secara terstandar dan terintegrasi, pengukuran pemanfaatan data statistik belum dilakukan secara komprehensif pada seluruh tahapan siklus pembangunan dan pengambilan keputusan, serta informasi kebutuhan dan pemanfaatan data statistik belum terintegrasi dalam proses perencanaan penyelenggaraan statistik nasional. Kondisi tersebut menyebabkan penyelenggaraan statistik nasional belum

memiliki landasan informasi yang memadai untuk menentukan prioritas penyediaan statistik yang relevan, bernilai guna, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan demikian, rumusan masalah dalam kajian ini adalah “**perencanaan penyelenggaraan statistik nasional belum didukung mekanisme yang memadai untuk menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan informasi mengenai kebutuhan dan pemanfaatan data statistik sebagai dasar penyelenggaraan statistik nasional**”.

METODE

Pendekatan analisis kebijakan digunakan dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, Survei Kebutuhan Data, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Analisis dilakukan melalui identifikasi permasalahan tata kelola penyelenggaraan statistik nasional, penentuan prioritas masalah menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), penyusunan alternatif kebijakan, serta evaluasi alternatif menggunakan kriteria Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Analisis didukung oleh konsep *Data-Driven Decision Making, Evidence-Based Policy Making, dan Continuous Improvement* sebagai landasan dalam perumusan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data-Driven Decision Making

Data-Driven Decision Making (DDDM) merupakan pendekatan pengambilan keputusan yang menempatkan data sebagai dasar utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan organisasi. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan keputusan yang lebih objektif, akurat, dan terukur dibandingkan keputusan yang hanya didasarkan pada intuisi atau pengalaman semata. Onesi-Ozigagun et al. (2024) menjelaskan bahwa DDDM memanfaatkan analisis data untuk meningkatkan efektivitas organisasi, mendukung efisiensi operasional, serta menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran. Perkembangan teknologi informasi, big data, dan kecerdasan buatan semakin memperkuat penerapan DDDM karena memungkinkan organisasi memperoleh informasi yang lebih cepat, rinci, dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam konteks penyelenggaraan statistik nasional, DDDM memberikan landasan bahwa penyediaan statistik perlu didukung oleh informasi yang mampu menggambarkan kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik secara memadai. Perencanaan statistik pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan mengenai statistik apa yang perlu diprioritaskan, dikembangkan, dipertahankan, atau ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, keputusan tersebut perlu didasarkan pada informasi yang akurat mengenai kebutuhan pengguna dan tingkat pemanfaatan statistik yang telah dihasilkan. Tanpa dukungan informasi tersebut, perencanaan statistik berisiko tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pengguna dan tidak mampu mengoptimalkan manfaat statistik dalam mendukung pembangunan dan pengambilan keputusan.

Evidence-Based Policy Making

Evidence-Based Policy Making (EBPM) merupakan pendekatan penyusunan kebijakan yang menekankan penggunaan bukti empiris, data, dan hasil penelitian sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan publik. Pendekatan ini berkembang dari kebutuhan untuk

meningkatkan kualitas kebijakan melalui penggunaan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Head (2016) menjelaskan bahwa penggunaan bukti dalam proses kebijakan memungkinkan pemerintah menghasilkan keputusan yang lebih efektif karena didasarkan pada pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan yang dihadapi dan dampak dari kebijakan yang akan diterapkan. Dalam praktiknya, bukti dapat berasal dari data statistik, hasil evaluasi program, penelitian ilmiah, maupun sumber informasi lain yang relevan dengan kebutuhan kebijakan.

Konsep EBPM relevan dengan permasalahan dalam kajian ini karena menempatkan pemanfaatan data sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kontribusi statistik terhadap pembangunan. Statistik yang dihasilkan tidak hanya perlu tersedia dan berkualitas, tetapi juga perlu digunakan dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, informasi mengenai pemanfaatan data statistik menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana statistik yang dihasilkan benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks perencanaan penyelenggaraan statistik nasional, informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi statistik yang memiliki nilai strategis tinggi sehingga pengembangan statistik dapat lebih berorientasi pada kebutuhan kebijakan dan pembangunan.

Continuous Improvement

Continuous Improvement merupakan konsep manajemen yang menekankan pentingnya perbaikan secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran dan evaluasi yang berlangsung terus-menerus. Konsep ini banyak dikaitkan dengan siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) yang dikembangkan oleh Deming, dimana organisasi melakukan perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*do*), evaluasi (*check*), dan tindakan perbaikan (*act*) secara berulang untuk meningkatkan kualitas kinerja. Melalui pendekatan ini, organisasi tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil, tetapi juga memastikan bahwa proses yang dilakukan terus disempurnakan berdasarkan informasi dan pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan sebelumnya. Kusek dan Rist (2004) menjelaskan bahwa proses perbaikan berkelanjutan memerlukan dukungan informasi yang memadai agar organisasi mampu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan maupun lingkungan strategis yang dihadapi.

Dalam konteks penyelenggaraan statistik nasional, konsep *continuous improvement* memberikan landasan bahwa informasi mengenai kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik perlu digunakan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan statistik. Informasi tersebut dapat membantu penyelenggara statistik mengevaluasi relevansi statistik yang telah tersedia, mengidentifikasi kebutuhan statistik baru, serta menentukan prioritas pengembangan statistik pada periode berikutnya. Dengan demikian, penyelenggaraan statistik nasional tidak hanya berfokus pada produksi data, tetapi juga mampu melakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan perubahan kebutuhan pengguna dan tingkat pemanfaatan statistik dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.

Penyelenggaraan Statistik Nasional

Penyelenggaraan statistik nasional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa statistik memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional. Melalui Sistem Statistik

Nasional, penyelenggaraan statistik dilaksanakan secara terpadu melalui Statistik Dasar, Statistik Sektor, dan Statistik Khusus guna memenuhi kebutuhan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dalam perkembangannya, meningkatnya kompleksitas pembangunan dan kebutuhan data mendorong penguatan tata kelola statistik agar statistik yang dihasilkan tidak hanya berkualitas secara metodologis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang semakin dinamis.

Dalam kerangka Sistem Statistik Nasional, BPS memiliki peran sebagai penyelenggara Statistik Dasar sekaligus pembina statistik nasional. Peran pembinaan tersebut mencakup pengembangan metodologi statistik, penyusunan standar statistik, pemberian rekomendasi kegiatan statistik, pengembangan kapasitas statistik, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan statistik di seluruh instansi pemerintah. Salah satu bentuk penguatan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas dan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan. Dengan posisi tersebut, BPS tidak hanya berfungsi sebagai produsen data statistik, tetapi juga sebagai penggerak penguatan kapasitas dan tata kelola statistik dalam Sistem Statistik Nasional.

Regulasi penyelenggaraan statistik nasional memberikan landasan bahwa statistik merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penyelenggaraan statistik tidak hanya memerlukan kemampuan menghasilkan data, tetapi juga kemampuan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan statistik yang dihasilkan memberikan manfaat dalam pembangunan. Oleh karena itu, informasi mengenai kebutuhan dan pemanfaatan data statistik menjadi penting dalam mendukung proses perencanaan statistik agar sumber daya statistik dapat diarahkan pada penyediaan statistik yang paling relevan dan bernilai guna. Dalam konteks tersebut, kajian ini relevan sebagai upaya memperkuat proses perencanaan penyelenggaraan statistik nasional melalui pemanfaatan informasi kebutuhan dan pemanfaatan data statistik secara lebih sistematis.

Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antarinstansi pemerintah. Kebijakan ini dibangun atas empat pilar utama, yaitu Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta Kode Referensi dan Data Induk. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, SDI diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis data. Selain itu, SDI juga menjadi fondasi penting dalam mendukung integrasi data pemerintah untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan, dan pelayanan publik.

Dalam implementasi SDI, BPS berperan sebagai Pembina Data Statistik yang bertanggung jawab menyusun dan mengembangkan standar statistik serta metadata statistik yang digunakan secara nasional. Peran tersebut diperkuat melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Melalui fungsi pembinaan tersebut, BPS berperan dalam memastikan bahwa data statistik yang

dihasilkan oleh berbagai instansi memiliki definisi, konsep, klasifikasi, dan dokumentasi yang seragam sehingga dapat dibandingkan, diintegrasikan, dan dimanfaatkan secara lebih luas.

Kebijakan SDI pada dasarnya bertujuan memastikan bahwa data yang dihasilkan pemerintah mampu mendukung kebutuhan pembangunan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses perencanaan data dan statistik perlu didukung oleh informasi yang memadai mengenai kebutuhan pengguna dan tingkat pemanfaatan data yang telah tersedia. Informasi tersebut dapat menjadi masukan penting dalam menentukan prioritas penyediaan data, pengembangan statistik baru, maupun peningkatan kualitas statistik yang telah ada. Dengan demikian, penguatan mekanisme identifikasi kebutuhan dan pengukuran pemanfaatan data statistik sebagaimana dibahas dalam kajian ini sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia untuk mewujudkan tata kelola data yang tidak hanya terstandar dan terintegrasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pengguna dan pembangunan nasional.

Alternatif Kebijakan

Penguatan Tata Kelola Identifikasi Kebutuhan Data Statistik

Alternatif kebijakan pertama adalah penguatan tata kelola identifikasi kebutuhan data statistik melalui pengembangan mekanisme yang terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai bagian dari proses perencanaan penyelenggaraan statistik nasional. Alternatif ini berangkat dari permasalahan bahwa identifikasi kebutuhan data statistik masih dilakukan secara beragam oleh masing-masing penyelenggara statistik dan belum menjadi bagian yang terstruktur dalam tata kelola Sistem Statistik Nasional. Akibatnya, informasi mengenai kebutuhan data pengguna belum tersedia secara komprehensif sebagai dasar penentuan prioritas statistik nasional.

Penguatan tata kelola identifikasi kebutuhan data statistik dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan, pedoman, dan instrumen nasional yang mengatur proses identifikasi kebutuhan data secara sistematis. Mekanisme tersebut dapat mencakup pemetaan kebutuhan data pemangku kepentingan, konsultasi pengguna, survei kebutuhan data, serta pemanfaatan kanal digital untuk menjangkau kebutuhan pengguna secara lebih luas. Informasi yang dihasilkan selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam penyusunan program statistik nasional, pengembangan statistik sektoral, dan penentuan prioritas pembinaan statistik.

Alternatif ini sejalan dengan konsep DDDM yang menekankan pentingnya penggunaan informasi yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks penyelenggaraan statistik nasional, informasi mengenai kebutuhan pengguna diperlukan untuk memastikan bahwa prioritas penyediaan statistik ditetapkan secara lebih objektif, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Alternatif ini juga sejalan dengan prinsip penyelenggaraan statistik dalam Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya penyediaan data yang relevan bagi pengguna.

Implementasi alternatif ini berpotensi meningkatkan relevansi statistik yang dihasilkan karena perencanaan statistik didasarkan pada kebutuhan nyata pengguna. Namun demikian, alternatif ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada identifikasi kebutuhan pengguna dan belum mempertimbangkan sejauh mana statistik yang tersedia telah dimanfaatkan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Akibatnya, informasi yang

dihasilkan belum memberikan gambaran yang utuh mengenai prioritas statistik yang perlu dikembangkan maupun dipertahankan.

Penguatan Tata Kelola Pengukuran Pemanfaatan Data Statistik

Alternatif kebijakan kedua adalah penguatan tata kelola pengukuran pemanfaatan data statistik melalui pengembangan mekanisme yang terstandar, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi serta mengukur penggunaan data statistik dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Alternatif ini berangkat dari permasalahan bahwa informasi mengenai pemanfaatan data statistik saat ini belum tersedia secara memadai sehingga perencanaan penyelenggaraan statistik nasional belum memiliki dasar yang cukup untuk menilai tingkat kebermanfaatan dan nilai strategis statistik yang telah dihasilkan.

Penguatan tata kelola pengukuran pemanfaatan data statistik dapat dilakukan melalui penyusunan kerangka nasional yang mencakup definisi, indikator, metode pengukuran, mekanisme pelaporan, serta pemanfaatan hasil pengukuran dalam proses perencanaan statistik. Pengukuran dapat dilakukan melalui survei pemanfaatan data, analisis penggunaan statistik dalam dokumen perencanaan dan kebijakan, pemantauan penggunaan data pada sistem informasi pemerintah, maupun pendekatan lain yang mampu menggambarkan tingkat penggunaan statistik oleh para pemangku kepentingan.

Alternatif ini sejalan dengan konsep EBPM yang menekankan pentingnya penggunaan bukti dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, alternatif ini juga mendukung prinsip *continuous improvement* karena informasi mengenai pemanfaatan data dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi efektivitas statistik yang telah dihasilkan dan menentukan prioritas pengembangannya. Pendekatan ini juga sejalan dengan semangat Sistem Statistik Nasional untuk meningkatkan kontribusi statistik dalam mendukung pembangunan dan pengambilan keputusan.

Implementasi alternatif ini berpotensi meningkatkan efektivitas perencanaan statistik karena keputusan pengembangan statistik dapat didasarkan pada informasi mengenai tingkat penggunaan dan manfaat statistik yang telah tersedia. Informasi tersebut juga dapat membantu penyelenggara statistik memfokuskan sumber daya pada statistik yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan dan kebutuhan pengguna. Namun demikian, alternatif ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada statistik yang telah tersedia dan digunakan pengguna. Akibatnya, kebutuhan data yang belum terpenuhi atau statistik baru yang diperlukan belum dapat teridentifikasi secara memadai. Oleh karena itu, meskipun mampu memberikan informasi mengenai nilai guna statistik, alternatif ini masih memerlukan dukungan mekanisme identifikasi kebutuhan data untuk menghasilkan perencanaan statistik yang lebih komprehensif.

Penguatan Tata Kelola Perencanaan Penyelenggaraan Statistik

Alternatif kebijakan ketiga adalah penguatan tata kelola perencanaan penyelenggaraan statistik nasional melalui integrasi informasi kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik. Alternatif ini berangkat dari permasalahan bahwa perencanaan statistik nasional belum didukung oleh informasi yang komprehensif mengenai kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik. Akibatnya, penyelenggara statistik belum memiliki dasar yang memadai untuk menentukan prioritas statistik yang perlu dikembangkan, dipertahankan, atau ditingkatkan kualitasnya sesuai kebutuhan pembangunan dan pengguna.

Penguatan tata kelola perencanaan penyelenggaraan statistik dapat dilakukan melalui penyusunan kerangka kebijakan, pedoman, instrumen, dan mekanisme koordinasi yang mengatur proses identifikasi kebutuhan data, pengukuran pemanfaatan data statistik, integrasi hasil pengukuran, serta pemanfaatannya dalam proses perencanaan statistik nasional. Kerangka tersebut dapat didukung oleh sistem informasi yang memungkinkan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis informasi kebutuhan pengguna serta pemanfaatan data statistik secara berkelanjutan. Hasil integrasi informasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan program statistik nasional, pengembangan statistik baru, penyempurnaan statistik yang telah tersedia, dan penentuan prioritas pembinaan statistik.

Alternatif ini memiliki landasan yang komprehensif karena menggabungkan perspektif DDDM, EBPM, dan *Continuous Improvement*. DDDM menekankan pentingnya penggunaan informasi yang objektif dalam pengambilan keputusan, sedangkan EBPM menekankan pentingnya bukti mengenai kontribusi statistik dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Sementara itu, *Continuous Improvement* menempatkan informasi kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik sebagai umpan balik untuk meningkatkan relevansi dan kebermanfaatan statistik secara berkelanjutan. Alternatif ini juga sejalan dengan prinsip Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya tata kelola data yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Dibandingkan alternatif sebelumnya, alternatif ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif karena mampu mengintegrasikan informasi kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik dalam satu mekanisme perencanaan. Dengan demikian, prioritas statistik dapat ditetapkan secara lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan pengguna, dan berorientasi pada kontribusi nyata statistik terhadap pembangunan serta pengambilan keputusan. Meskipun memerlukan investasi kelembagaan, metodologi, sistem informasi, dan koordinasi yang lebih besar dibandingkan alternatif lainnya, alternatif ini memiliki potensi manfaat paling tinggi karena mampu mengatasi akar permasalahan yang telah diidentifikasi dalam kajian, yaitu belum tersedianya mekanisme yang memadai untuk mengelola informasi kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik sebagai dasar perencanaan penyelenggaraan statistik nasional.

Evaluasi Alternatif Kebijakan

Untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan perencanaan penyelenggaraan statistik nasional, dilakukan evaluasi terhadap tiga alternatif kebijakan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi ini bertujuan menilai kemampuan masing-masing alternatif dalam menjawab akar permasalahan yang telah diidentifikasi, yaitu belum memadainya mekanisme untuk menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan informasi mengenai kebutuhan dan pemanfaatan data statistik sebagai dasar perencanaan penyelenggaraan statistik nasional.

Tabel 1. Evaluasi Alternatif Kebijakan Menggunakan Kriteria Dunn

Kriteria	Penguatan Identifikasi Kebutuhan Data	Penguatan Pengukuran Pemanfaatan Data	Penguatan Perencanaan Penyelenggaraan Statistik
Efektivitas	4	4	5
Efisiensi	4	4	3
Kecukupan	3	3	5
Pemerataan	4	3	5
Responsivitas	5	3	5
Ketepatan	4	4	5
Total Skor	24	21	28

Keterangan skor: 1 = sangat rendah; 2 = rendah; 3 = sedang; 4 = tinggi; 5 = sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi, alternatif pertama dinilai mampu meningkatkan relevansi statistik melalui identifikasi kebutuhan pengguna, namun belum mempertimbangkan tingkat pemanfaatan statistik yang telah tersedia. Alternatif kedua dinilai mampu menghasilkan informasi mengenai pemanfaatan data statistik dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, tetapi belum dapat mengidentifikasi kebutuhan data yang belum terpenuhi. Sementara itu, alternatif ketiga memperoleh skor tertinggi karena mampu mengintegrasikan informasi kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik ke dalam satu mekanisme perencanaan yang terpadu.

Dari sisi efektivitas dan kecukupan, alternatif ketiga dinilai paling mampu menjawab seluruh penyebab masalah yang telah diidentifikasi, yaitu keterbatasan identifikasi kebutuhan data, keterbatasan pengukuran pemanfaatan data statistik, serta belum terintegrasinya kedua informasi tersebut dalam proses perencanaan penyelenggaraan statistik nasional. Alternatif ini juga memiliki tingkat pemerataan dan responsivitas yang tinggi karena mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok pengguna sekaligus mempertimbangkan kontribusi nyata statistik terhadap pembangunan dan pengambilan keputusan. Meskipun memerlukan sumber daya, koordinasi, dan investasi kelembagaan yang lebih besar dibandingkan alternatif lainnya sehingga memperoleh skor efisiensi yang lebih rendah, manfaat yang dihasilkan dinilai lebih besar dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan kriteria Dunn, alternatif Penguatan Tata Kelola Perencanaan Penyelenggaraan Statistik merupakan alternatif yang paling direkomendasikan karena dinilai paling komprehensif sebagai dasar perencanaan penyelenggaraan statistik nasional. Dengan demikian, perencanaan statistik nasional diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, berorientasi pada manfaat statistik, serta mampu mendukung pembangunan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan Penguatan Tata Kelola Perencanaan Penyelenggaraan Statistik direkomendasikan melalui penyusunan “Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan dan Pengukuran Pemanfaatan Data Statistik dalam Penyelenggaraan Statistik Nasional”. Peraturan ini menjadi acuan bagi penyelenggara statistik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan dan pengukuran pemanfaatan data statistik secara terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai bagian dari proses perencanaan penyelenggaraan statistik nasional.

Informasi mengenai kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik yang dihasilkan melalui mekanisme tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan prioritas penyelenggaraan statistik, mengevaluasi keberlanjutan kegiatan statistik, serta mengembangkan statistik baru sesuai kebutuhan pembangunan. Informasi tersebut juga dapat mendukung pengambilan keputusan mengenai pemeliharaan, peningkatan kualitas, pengembangan, maupun penghentian kegiatan statistik berdasarkan tingkat kebutuhan dan pemanfaatannya. Dengan demikian, sumber daya statistik dapat dialokasikan secara lebih efektif pada penyediaan data yang relevan, bernilai guna, dan mendukung kebutuhan pembangunan.

Implementasi kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi BPS, kebijakan ini dapat memperkuat pelaksanaan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan statistik nasional melalui penyediaan informasi yang lebih memadai untuk mendukung proses perencanaan statistik. Bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, tersedianya pedoman nasional akan memberikan acuan yang seragam dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mengukur pemanfaatan data statistik sehingga mendukung penyelenggaraan statistik yang lebih terarah dan konsisten. Sementara itu, bagi Kementerian PPN/Bappenas, informasi yang dihasilkan dapat menjadi salah satu masukan dalam proses penetapan dan pengembangan Data Statistik pada kerangka Satu Data Indonesia sehingga penyediaan data pemerintah semakin selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat relevansi, efektivitas, dan kebermanfaatan penyelenggaraan statistik nasional dalam mendukung pembangunan dan pengambilan keputusan berbasis data.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan statistik nasional memerlukan mekanisme perencanaan yang didukung oleh informasi yang memadai mengenai kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan penyelenggaraan statistik nasional saat ini masih menghadapi tiga permasalahan utama, yaitu: mekanisme identifikasi kebutuhan data statistik yang belum dilaksanakan secara terstandar dan terintegrasi, pengukuran pemanfaatan data statistik yang belum dilakukan secara komprehensif pada seluruh tahapan siklus pembangunan dan pengambilan keputusan, serta belum terintegrasinya informasi kebutuhan dan pemanfaatan data statistik dalam proses perencanaan penyelenggaraan statistik nasional. Berdasarkan analisis prioritas masalah menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), permasalahan mengenai perencanaan penyelenggaraan statistik nasional yang belum didukung informasi yang memadai mengenai kebutuhan dan pemanfaatan data statistik merupakan permasalahan yang paling strategis untuk ditangani.

Evaluasi terhadap tiga alternatif kebijakan menggunakan kriteria Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan bahwa alternatif Penguatan Tata Kelola Perencanaan Penyelenggaraan Statistik melalui integrasi informasi kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik memperoleh skor tertinggi (28) dibandingkan alternatif Penguatan Identifikasi Kebutuhan Data (24) dan alternatif Penguatan Pengukuran Pemanfaatan Data (21). Alternatif tersebut dinilai paling komprehensif karena mampu mengintegrasikan kedua sumber informasi ke dalam satu

mekanisme perencanaan yang terpadu sehingga dapat mengatasi seluruh akar permasalahan yang telah diidentifikasi.

Kebijakan yang direkomendasikan adalah penyusunan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan dan Pengukuran Pemanfaatan Data Statistik dalam Penyelenggaraan Statistik Nasional. Melalui kebijakan ini, diharapkan perencanaan penyelenggaraan statistik nasional menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, berorientasi pada manfaat statistik, serta mampu mendukung penyediaan statistik yang relevan, bernilai guna, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan dan pengambilan keputusan berbasis data.

REFERENSI

- Ardani, R., & Cahyani, D. (2022). Tantangan Kebijakan Satu Data Indonesia: Studi kasus pada sistem pencatatan kematian dan penyebab kematian di DKI Jakarta. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 25(1), 52–60.
- Azizah, N., & Permana, A. (2024). Upaya koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.173>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Dotulong, G. W. I., Kawuwung, P. C. E., & Santa, K. (2026). Pemanfaatan big data dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data di berbagai bidang: Studi literatur. *Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 6(1), 234–242.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Far, R. A. F. (2022). Musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) sebagai sistem komunikasi dalam pembangunan nasional. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 57–76.
- Head, B. W. (2016). Toward more “evidence-informed” policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484.
- Herwanti, E., Imaningsih, N., & Fadil, C. (2024). Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap statistik dalam analisis perekonomian daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 311–316.
- MacFeely, S. (2019). The big (data) bang: Opportunities and challenges for compiling SDG indicators. *Global Policy*, 10(S1), 121–133.
- Maratis, J., Wijaya, A. F., & Wike. (2025). Tata kelola data statistik menuju transformasi statistik dalam perspektif collaborative governance plus multi helix (Studi pada Badan Pusat Statistik). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 11(2), 164–172.
- Maulidya, N., & Rozikin, M. (2022). Analisis retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2).
- Mozin, S. Y., Dumbela, U. S., Lestari, D. A., Ramadhani, R., & Noho, N. N. (2025). Peran statistik administrasi dalam evaluasi kebijakan publik: Studi literatur. *JPS: Jurnal Public Studies*, 2(2), 105–116.
- Onesi-Ozigagun, A., et al. (2024). Data-driven decision making: Shaping the future of business efficiency and customer engagement. *International Journal of Multidisciplinary Research Updates*, 7(2), 19–29.

- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
- Salsabila, T. H., Indrawati, T. M., & Fitrie, R. A. (2024). Meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan publik melalui kecerdasan buatan. *Jurnal Internet Software Engineering*, 1(2), 1–21.
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. *Locus*, 11(2), 112–133.
- Tajulfitri, S. (2019). Statistik dan peranannya dalam pembangunan nasional. *Jurnal Cendekia Niaga*, 3(1).
- United Nations. (2014). *A world that counts: Mobilising the data revolution for sustainable development*. United Nations.